

## **BAB V**

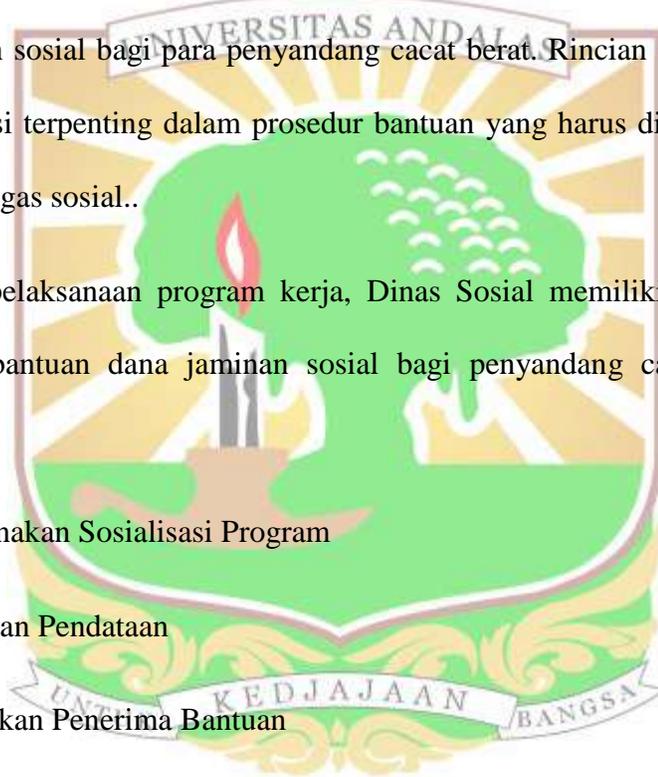
### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan teori yang telah dijelaskan dari beberapa bab di atas kini penulis dapat menyimpulkan beberapa pokok penting dari penyaluran bantuan dana jaminan sosial bagi para penyandang cacat berat. Rincian dari kesimpulan ini merupakan isi terpenting dalam prosedur bantuan yang harus dilakukan komponen dan atau petugas sosial..

Dalam pelaksanaan program kerja, Dinas Sosial memiliki beberapa tahapan penyaluran bantuan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat berat, sebagai berikut:

1. Melaksanakan Sosialisasi Program
2. Melakukan Pendataan
3. Menetapkan Penerima Bantuan
4. Menyalurkan Bantuan Dana Jaminan Sosial
5. Pemberhentian dan Penggantian Penerima Bantuan
6. Pemutakhiran Data
7. Pengaduan Melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)



## 5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan dari beberapa bab di atas dan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu :

1. Kepada petugas-petugas yang menjalankan penyaluran dana dari sosialisasi program hingga pemutakhiran data haruslah menjalankan tugas dengan teliti agar tidak terjadinya kesalahan dalam mendata kartu keluarga yang telah dikumpulkan dan tidak terjadinya keributan antar masyarakat penerima dengan petugas sosial.
2. Disarankan kepada para petugas agar mengecek ulang pengambilan data sebelum melaksanakan program pemberian bantuan, karena jumlah bantuan yang telah dipersiapkan telah cukup sesuai dengan perhitungan per kartu keluarga.
3. Kepada pegawai Dinas Sosial agar dapat meningkatkan manajemen kerja dari atasan ke bawahan sehingga tercipta kondisi yang efektif dan efisien dengan cara meningkatkan kinerja serta kedisiplinan pegawai.
4. Apabila diadakan proses bantuan, maka perangkat kerja sebaiknya mengumumkannya secara terang-terangan dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat langsung, agar masyarakat benar-benar mengetahui apakah bantuan itu ada atau tidak.

5. Perangkat kerja Dinas Sosial harus memperketat keamanan dari pihak lain yang kadang melakukan penyebaran informasi hoax tentang pengadaan bantuan sosial pangan supaya tak terjadi kesalahpahaman antar masyarakat dengan masyarakat Kota Padang
6. Saat melaksanakan kegiatan yang menggunakan biaya dari dinas, maka sebaiknya dalam penulisan dana anggaran yang dipakai harus sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) agar tidak terjadinya kesalahpahaman yang berlangsung kepada masyarakat. Di sinilah bidang Bendahara Umum harus memeriksa dana keluar secara detail.

